

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR: 022/KU.00.01/JI-30/10/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, dipandang perlu menunjuk seorang Bendahara Pengeluaran;
- b. Bahwa penunjukan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a haruslah pegawai yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kebendaharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
 7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 357/KU.01.00/K1/11/2024 Tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 11. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-480/AG/AG.5/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024
 12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686149/2025 tgl 2 Desember 2024

Memperhatikan : Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang Nomor 17/KU.01.00/JI-34/10/2025 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Persetujuan Permohonan Peminjaman SDM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor 93/KU.01.00/JI.30/12/2024 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2024 terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;

KEDUA : Mengangkat Bendahara Pengeluaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu

Pada tanggal : 31 Oktober 2025

KEPALA SEKRETARIAT

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



M. RIZAL FIRDAUS RASTIKO, S.IP

NIP. 19860221 200701 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor: 022/KU.00.01/JI-30/10/2025
Tanggal : 31 Oktober 2025

**BENDAHARA PENGELUARAN
SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	Jody El Firly, S.IP., M.I.P NIP. 19940729 201902 1 002	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Bendahara Pengeluaran

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



M. RIZAL FIRDAUS RASTIKO,S.IP
NIP. 19860221 200701 1 001